

ANALISIS FAKTOR SUMBERDAYA DALAM PROGRAM PERPUSTAKAAN DESA DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Gita Mulya Fauziah¹, Etih Henriyani², Ahmad Juliars³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : gitamulyafauziah3881@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sumberdaya Dalam Program Perpustakaan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator masalah yaitu tidak adanya pegawai tetap yang bertugas untuk menunggu perpustakaan dan jumlah koleksi non fiksi perpustakaan desa yang terbilang sedikit sehingga hal tersebut dapat menghambat dalam proses layanan perpustakaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 31 orang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis/pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Analisis Faktor Sumberdaya Dalam Program Perpustakaan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis belum optimal. Dari dimensi sumberdaya yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan optimal yaitu adanya staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai.

Kata Kunci : *Sumberdaya, Program Perpustakaan Desa.*

PENDAHULUAN

Program perpustakaan desa memegang peranan penting dalam upaya peningkatan literasi masyarakat desa. Perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku, tetapi lebih dari itu, ia menjadi pusat belajar dan sumber informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di pedesaan. Kehadirannya membantu mengatasi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan

teknologi, yang sering kali menjadi kendala utama dalam pengembangan literasi di daerah.

Melalui perpustakaan desa, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis bahan bacaan, mulai dari buku pelajaran, novel, majalah, hingga informasi praktis mengenai pertanian, kesehatan, atau keterampilan. Hal ini secara langsung menstimulasi minat baca dan memperkaya wawasan mereka. Selain itu, perpustakaan desa

seringkali menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat dilaksanakannya berbagai program literasi seperti bedah buku, pelatihan menulis, atau lokakarya keterampilan. Interaksi sosial yang terjadi di perpustakaan juga mendorong budaya berbagi pengetahuan dan diskusi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran berkelanjutan.

Keberhasilan proses implementasi program perpustakaan desa sangat bergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Wahab (2008:89), menyebutkan bahwa "implementasi mencakup proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi dapat ditentukan oleh kekuatannya sendiri dalam mengoprasionalkan program yang telah dirancang sebelumnya". Beberapa aspek dari keseluruhan proses implementasi memerlukan pekerjaan yang disyaratkan oleh pedoman yang ditetapkan.

Widodo (2010:98) mengatakan bahwa "faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan". Dari kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa peranan sumberdaya sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan. Dan "sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan". Dari

kutipan tersebut sumberdaya memiliki beberapa aspek yang saling berhubungan.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program perpustakaan desa masih menghadapi tantangan dalam proses implementasinya, salah satu tantangannya yaitu berkaitan dengan terbatasnya sumberdaya baik secara kualitas maupun kuantitas dan masalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengembangan perpustakaan itu sendiri. Sejalan menurut Sutarno (2008:22) mengatakan bahwa "Perpustakaan desa setidaknya harus memiliki tenaga perpustakaan minimal dua orang dengan latar pendidikan tertentu untuk memastikan kelancaran operasional perpustakaan, yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jumlah staf sesuai program dan layanan perpustakaan desa". Dan menurut Edison (2022:6) mengemukakan bahwa "Manajemen perpustakaan desa perlu memahami kebutuhan staf, memberikan kesempatan pengembangan, serta memastikan staf memiliki kompetensi yang sesuai dengan peran yang dijalankan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien". Itu menunjukkan bahwa pegawai perpustakaan desa seharusnya mempunyai sumberdaya yang keahlian dan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan agar proses layanan perpustakaan dapat berjalan secara optimal.

Dan menurut Edison (2022:7) mengatakan bahwa “Perlunya dukungan sarana yang layak sebagai bagian dari pengorganisasian yang efektif untuk mencapai tujuan perpustakaan desa dan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat”. Dan menurut Schermerhorn (2011:12) mengemukakan bahwa “Proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengendalian prasarana perpustakaan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan desa agar kegiatan perpustakaan berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal”. sarana dan prasana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena ketiadaan atau ketidaklayakan sarana dan prasarana dapat menghambat operasional, mengurangi efisiensi, bahkan membuat implementasi kebijakan menjadi tidak mungkin.

Begitu pula sama halnya di Kabupaten Ciamis melakukan upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat salah satunya oleh Pemerintah Desa Sukadana dengan adanya perpustakaan desa yang secara resmi dibentuk pada tahun 2022 yang bernama “Perpustakaan Bujangga Loka” dengan peraturan resmi Surat Keputusan Kepala Desa Sukadana No. 33 Tahun 2022 tentang Pendirian Perpustakaan Desa Sukadana dan Surat Keputusan Kepala Desa No. 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan “Bujangga Loka” Desa

Sukadana. kewenangan sangat dibutuhkan bagi pelaksana program sebagai bentuk landasan bagi tindakan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan secara politik dapat dijalankan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat. Sejalan menurut Agustino (2006:151) mengatakan bahwa “kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan”. dan dengan adanya perpustakaan desa diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat.

Namun pada proses pelaksanaannya tata kelola perpustakaan desa belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program perpustakaan desa yaitu tidak adanya pegawai tetap yang bertugas untuk menunggu perpustakaan sehingga hal tersebut dapat menghambat dalam proses layanan perpustakaan dan jumlah koleksi non fiksi perpustakaan desa yang terbilang sedikit dibandingkan dengan koleksi fiksi yang membuat pengunjung perpustakaan banyaknya hanya diminati oleh anak-anak saja.

Maka berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sumberdaya

dalam program perpustakaan desa di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Faktor sumberdaya dalam pelaksanaan program perpustakaan desa di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis didasarkan pada dimensi sumberdaya, yang di dalamnya berisi Adanya staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan, Adanya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator, Adanya sarana prasarana pendukung yang memadai.

Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu teknik sensus dengan jumlah responden sebanyak 31 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan pembahasan masing-masing indikator yang

dijadikan alat ukur penelitian sebagai berikut:

a. Adanya staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat diperoleh keterangan bahwa sebenarnya pegawai perpustakaan desa itu dilakukan secara sukarelawan dan bisa dikatakan masih kurang terkadang masih dibantu oleh ibu-ibu PKK dalam melakukan kegiatan pelayanan perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa pegawai perpustakaan desa kurang dalam segi jumlah dalam kemampuan mungkin sudah cukup mumpuni, namun pada saat berkunjung ke perpustakaan desa tidak ada pegawai yang menunggu dibagian pelayanan jadi pengunjung kemungkinan susah untuk menanyakan terkait buku yang dibutuhkan.

Hambatan yang dihadapi dalam indikator ini yaitu pegawai perpustakaan yang hampir semuanya merupakan perangkat desa juga, jadi bisa dikatakan bahwa mereka melakukan rangkap jabatan dan itu membuat mereka kesulitan dalam membagi waktu yang akhirnya salah satu kegiatan menjadi tidak optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pegawai perpustakaan mengupayakan dengan cara meminta bantuan dari Kader PKK dalam hal pelayanan perpustakaan.

Menurut Sutarno (2008:22) mengatakan bahwa “Perpustakaan desa setidaknya harus memiliki tenaga perpustakaan minimal dua orang dengan latar pendidikan tertentu untuk memastikan kelancaran operasional perpustakaan, yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jumlah staf sesuai program dan layanan perpustakaan desa”. Dan menurut Edison (2022:6) mengemukakan bahwa”Manajemen perpustakaan desa perlu memahami kebutuhan staf, memberikan kesempatan pengembangan, serta memastikan staf memiliki kompetensi yang sesuai dengan peran yang dijalankan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien”.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini menunjukan bahwa pegawai perpustakaan desa seharusnya mempunyai sumberdaya yang keahlian dan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan agar proses layanan perpustakaan dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa indikator adanya staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan masih belum optimal dibuktikan dengan adanya hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah pegawai perpustakaan. Sehingga hambatan ini perlu diatasi agar pegawai perpustakaan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada pemustaka atau masyarakat.

b. Adanya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kewenangan sudah diberikan dalam bentuk Surat keputusan Kepala Desa tentang pengelola perpustakaan yang berisikan tugas dan fungsi tiap bagian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab pegawai perpustakaan desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa pegawai perpustakaan desa sudah mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas maupun fungsinya karena sudah tercantum pada Surat Keputusan Kepala Desa No. 34 Tahun 2022 tentang pengelola perpustakaan dan struktur organisasinya pun sudah jelas karena ada terlihat di ruang baca perpustakaan desa.

Menurut Agustino (2006:151) mengatakan bahwa “kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan”.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan sangat dibutuhkan bagi pelaksana program Kewenangan ini memberikan landasan bagi tindakan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan secara politik dapat

dijalankan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa indikator adanya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa No. 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan “Bujangga Loka” Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.

c. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan dapat dikatakan cukup dan baik untuk bagian yang pentingnya namun jika dilihat mungkin hanya kurang luas saja untuk area membaca.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa sarana yang ada di perpustakaan desa terawat dengan baik dan keadaannya pun memadai seperti rak buku yang cukup bagus, buku-buku tersusun rapi, meja dan kursi pun tersedia sangat menunjang untuk kegiatan membaca.

Namun jika dilihat dari jumlah koleksi perpustakaan desa sebagai prasarana masih belum dikatakan optimal karena jumlah koleksi non fiksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan fiksi sehingga pengunjung perpustakaan banyaknya hanya diminati oleh anak-anak saja. Hambatan yang dihadapi dalam

indikator ini yaitu terbatasnya anggaran untuk menambah koleksi non fiksi dan seringnya hanya menerima hibah sebagai bentuk sumbang buku dari Perguruan Tinggi maupun dari Perpustakaan Nasional.

Sejalan menurut Edison (2022:7) mengatakan bahwa “Perlunya dukungan sarana yang layak sebagai bagian dari pengorganisasian yang efektif untuk mencapai tujuan perpustakaan desa dan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat”. Dan menurut Schermerhorn (2011:12) mengemukakan bahwa “Proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengendalian prasarana perpustakaan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan desa agar kegiatan perpustakaan berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal”.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena ketiadaan atau ketidaklayakan sarana dan prasarana dapat menghambat operasional, mengurangi efisiensi, bahkan membuat implementasi kebijakan menjadi tidak mungkin. Dengan kata lain, sarana dan prasarana adalah faktor penentu yang melengkapi sumber daya manusia dan aspek legalitas, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang memberikan dampak positif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa indikator adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan adanya hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran untuk menambah koleksi bahan bacaan non fiksi. Sehingga hambatan ini perlu diatasi agar agar masyarakat sebagai pengunjung atau pemustaka dapat memperluas pengetahuan umum dan keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sumberdaya dalam program perpustakaan “Bujangga Loka” Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Dari dimensi sumberdaya yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat dua indikator yang belum berjalan dengan optimal dan menemui hambatan yaitu pegawai perpustakaan yang hampir semuanya merupakan perangkat desa juga, jadi bisa dikatakan bahwa mereka melakukan rangkap jabatan dan itu membuat mereka kesulitan dalam membagi waktu yang akhirnya salah satu kegiatan menjadi tidak optimal. Dan dalam pengadaan prasarana yang jumlah koleksi bacaan non fiksinya masih terbilang sedikit yang membuat pengunjung perpustakaan banyaknya hanya diminati oleh anak-anak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Putra Purwanto. 2020. Manajemen Perpustakaan Desa. Bandar Lampung: Yayasan Petualang Literasi.
- Wahab, A. (2008). Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andriyani, L., Purwati, M., Wijayanti, A. G., Rahmawati, H., Putri, H. L., & Khotimah, D. N. (2022). Optimalisasi Peran Perpustakaan Desa Guna Meningkatkan Minat Literasi di Desa Banjarnegoro Mertoyudan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- Shopa, D., Djadjuli, R. D., & Risnawan, W. (2024). Analisis Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Pemerintah Desa (Upaya Peningkatan Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis). *Inskripsi*, 1(2), 387-393.

- Wahdian, A., & Hardiansyah, F. (2023). Meningkatkan Literasi Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Pembentukan Perpustakaan Desa di Balai Desa Batu Putih Sumenep. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 305-312.
- Widayanto, M. T. (2020). Optimalisasi perpustakaan desa untuk meningkatkan budaya literasi di Desa Jatiadi, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 2(01), 32-39.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- Keputusan Kepala Desa Sukadana Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pendirian Perpustakaan Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Keputusan Kepala Desa Sukadana Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan “Bujangga Loka” Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.